

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai partisipasi warga negara terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal ini permasalahan utamanya adalah mengenai aturan Kawasan Rawan Bencana (KRB) di daerah sekitar lereng Merapi. Yang menjadi permasalahan utamanya adalah keabsahan perlawanan kami terhadap pemberian label sebagai daerah rawan bencana dan juga bentuk dari perlawanan terhadap peraturan tersebut telah berlangsung. Aturan KRB dinilai oleh masyarakat sebagai ranah pembatasan bagi penghidupan warga, di mana dalam hal ini banyak larangan untuk kami beraktivitas. Oleh karena itu muncul lah perlawanan yang bisa dikatakan Menantang Mati Untuk Hidup dikarenakan kami tetap bersikeras untuk menolak berhenti berkegiatan di daerah rawan bencana. Hal ini juga terkait dengan adanya manajemen risiko bencana di mana kami sebagai warga daerah rawan bencana dipertanyakan kemampuannya dan pengetahuannya terhadap bahaya dan risiko dari tempat kami tinggal.

Dalam tulisan ini penulis memosisikan diri sebagai subyek, sebagai warga negara yang co-exist dengan negara, dan mencoba mengembalikan makna partisipasi sebagai penggunaan hak warga negara untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Kalaulah pemerintah memosisikan diri sebagai penyelenggara kekuasaan negara, dalam kapasitas sebagai warganegara, penulis adalah pemilik sah, tepatnya pemegang saham, negara itu sendiri. Hal ini memiliki implikasi metodologis yang sangat penting. Keilmiahannya dalam tulisan ini tidak didapatkan dari pengamatan peneliti dari luar terhadap kami warga lereng Merapi melainkan dari intersubyektifitas kami sebagai warga negara yang berhadapan dengan negara, dan membuat keputusan atas nama kami. Jelasnya, tulisan ini adalah ekspresi diri penulis sebagai seorang warganegara yang ikut menggumuli kebijakan publik, khususnya kebijakan pengelolaan risiko bencana, dan penulis adalah pihak yang terdampak. Ada keinginan untuk menceritakan subyektifitas penulis sebagai warga negara, dan sajian ini berisiko ditolah secara akademis karena melanggar kaidah obyektivitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi warga lereng merapi yang berupa perlawanan secara kreatif terhadap aturan Kawasan Rawan Bencana (KRB) membuahkan hasil manis. Terbentuknya wisata Jeep Volcano Tour di daerah bekas erupsi Merapi menunjukkan bahwa masyarakat tidak serta merta terima dengan labeling yang diberikan pemerintah. Hal ini menunjukkan pula bahwa bentuk partisipasi berupa perlawanan tidak selalu bersifat destruktif.

Kata kunci : partisipasi, kebijakan, warga negara, perlawana

Abstract

This paper discusses citizen participation in the applicable regulations. In this case the main problem is regarding the rules of Disaster Prone Areas (KRB) in the area around the slopes of Merapi. The main problem is the validity of our resistance to labeling as disaster-prone areas and also the form of resistance to these regulations has taken place. The KRB rules are assessed by the community as a limiting area for people's livelihoods, where in this case there are many restrictions for us to move. Therefore there was resistance which could be said to be Challenging to Die for Life because we continued to insist on refusing to stop activities in disaster-prone areas. This is also related to the existence of disaster risk management where we as citizens of disaster-prone areas are questioned about their abilities and knowledge of the dangers and risks of where we live.

In this paper the authors position themselves as subjects, as citizens who co-exist with the state, and try to restore the meaning of participation as the use of the right of citizens to fight for the common good. If the government positions itself as the organizer of state power, in its capacity as a citizen, the author is the rightful owner, precisely the shareholder, of the country itself. This has very important methodological implications. The scholarship in this paper is not obtained from the observations of outside researchers on us residents of the slopes of Merapi but from our intersubjectivity as citizens facing the state, and making decisions on our behalf. Clearly, this paper is the self-expression of the writer as a citizen who has participated in struggling with public policy, especially disaster risk management policies, and the author is the affected party. There is a desire to tell the subjectivity of the writer as a citizen, and this presentation risks being academically treated for violating the rules of objectivity.

The results of this study indicate that the form of participation of the residents of the Merapi slopes in the form of creative resistance to the rules of Disaster Prone Areas (KRB) yielded sweet results. The establishment of a Jeep Volcano Tour in the former Merapi eruption area shows that the community does not necessarily accept labeling given by the government. This also shows that the form of participation in the form of resistance is not always destructive.

Keywords: participation, policy, citizens, resistance